

BAB I

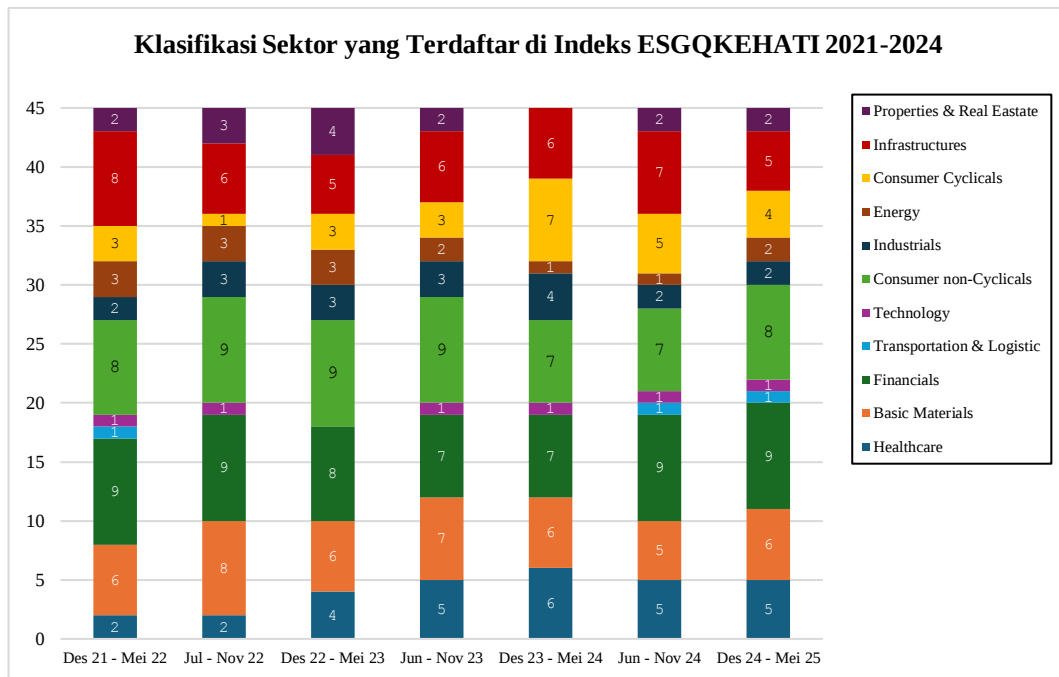
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI merupakan indeks saham yang diterbitkan dari hasil kerja sama antara yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks ini diluncurkan pada 20 Desember 2021 dengan tujuan untuk melengkapi Indeks SRI-KEHATI yang sebelumnya telah diluncurkan pada tahun 2009 dan menjadi acuan investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di pasar modal Indonesia (KEHATI, 2021). Yayasan KEHATI merupakan lembaga nirlaba yang didirikan pada 12 Januari 1994, yang mengemban amanat untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana hibah guna mendukung pelestarian serta pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia secara berkelanjutan. Sumber dana hibah tersebut berasal dari donor multilateral dan bilateral, sektor swasta, *endowment fund*, *filantropi*, dan *crowd-funding* (KEHATI, 2020). Berbeda dengan indeks pendahulunya yaitu indeks SRI-KEHATI, indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI merupakan indeks yang mengintegrasikan aspek-aspek ESG dengan indikator kualitas keuangan dalam proses seleksi saham konstituennya (Vauzi, 2021). Indeks ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode ESGQKEHATI.

Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI berisikan 45 saham terpilih berdasarkan evaluasi terhadap kinerja keberlanjutan (*sustainability*) dan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, saham-saham yang tergabung dalam indeks ini juga memenuhi kriteria likuiditas yang memadai sehingga layak untuk diperdagangkan sebagai bagian dari konstituen indeks (KEHATI, 2021). Tahap awal dalam pemilihan konstituen dalam indeks ESGQKEHATI yaitu dengan menentukan saham-saham yang *eligible* untuk masuk ke dalam indeks dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan tingkat likuiditasnya, serta mengecualikan saham-saham dari perusahaan yang bisnis instinya bergerak di bidang tembakau, persenjataan, berkaitan dengan pornografi, alkohol, pertambangan batu bara, nuklir, unsur perjudian, pestisida, dan yang berkaitan dengan Produk Rekayasa Genetika. Tahap selanjutnya mencakup proses penilaian

terhadap aspek ESG atas saham-saham yang telah lolos seleksi awal. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator ESG yang relevan berdasarkan sektor industri masing-masing atau materialitas eksposur perusahaan. Saham-saham yang memperoleh skor ESG di atas ambang batas yang telah ditetapkan oleh KEHATI, serta tidak terindikasi memiliki isu kontroversial yang material, akan dimasukkan ke dalam *universe* saham untuk pemilihan konstituen Indeks ESGQKEHATI. Sebanyak 45 saham konstituen dalam Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI dipilih dari universe saham yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan skor ESG dan kualitas kinerja keuangan perusahaan. Penilaian kualitas keuangan didasarkan pada beberapa indikator, yaitu profitabilitas yang dinilai dengan *Return On Equity* (ROE), tingkat solvabilitas yang dinilai dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), serta stabilitas kinerja yang dinilai dengan *Earnings Variability* (EV). Selanjutnya, skor ESG digabungkan dengan skor kinerja keuangan untuk membentuk nilai komposit kualitas dan ESG. Saham-saham dengan 45 nilai komposit tertinggi kemudian ditetapkan sebagai konstituen Indeks ESGQKEHATI (KEHATI, 2021). Pemilihan konstituen indeks dilakukan pada evaluasi mayor, yaitu setiap bulan Mei dan November. Sedangkan evaluasi minor dilakukan setiap bulan Februari dan Agustus (KEHATI, 2021).



Gambar 1.1 Klasifikasi Sektor Yang Terdaftar di Indeks ESGQKEHATI Periode 2021-2024

Sumber: BEI, Data diolah Penulis (2025)

Berdasarkan gambar 1.1, sektor keuangan (*financials*) merupakan sektor dengan jumlah perusahaan terbanyak yang terdaftar dalam Indeks ESGQ KEHATI selama periode 2021–2024, yakni sebanyak 58 perusahaan., kemudian diikuti oleh sektor *consumer non-cyclicals* dengan 57 perusahaan. Sedangkan sektor dengan jumlah perusahaan paling sedikit dalam indeks ini adalah sektor transportation and logistic, yang hanya mencakup 3 perusahaan. Data ini menunjukkan bahwa keterwakilan sektor-sektor tertentu yang tergolong sebagai sektor *high profile* dalam Indeks ESGQ KEHATI masih terbatas. Sebagai contoh, sektor transportasi yang pada tahun 2022 tercatat sebagai salah satu sektor penyumbang emisi terbesar di Indonesia (Databoks, 2024), justru menjadi sektor yang paling sedikit konsisten terdaftar di indeks ESGQKEHATI. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan besar bagi sektor-sektor strategis, khususnya yang memiliki dampak lingkungan signifikan belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan antara kinerja keberlanjutan (ESG) dan kinerja keuangan secara optimal.

Berdasarkan gambaran umum objek penelitian yang telah diuraikan, perusahaan yang konsisten terdaftar di Indeks ESGQKEHATI sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian dalam topik pengungkapan emisi karbon. Indeks ini

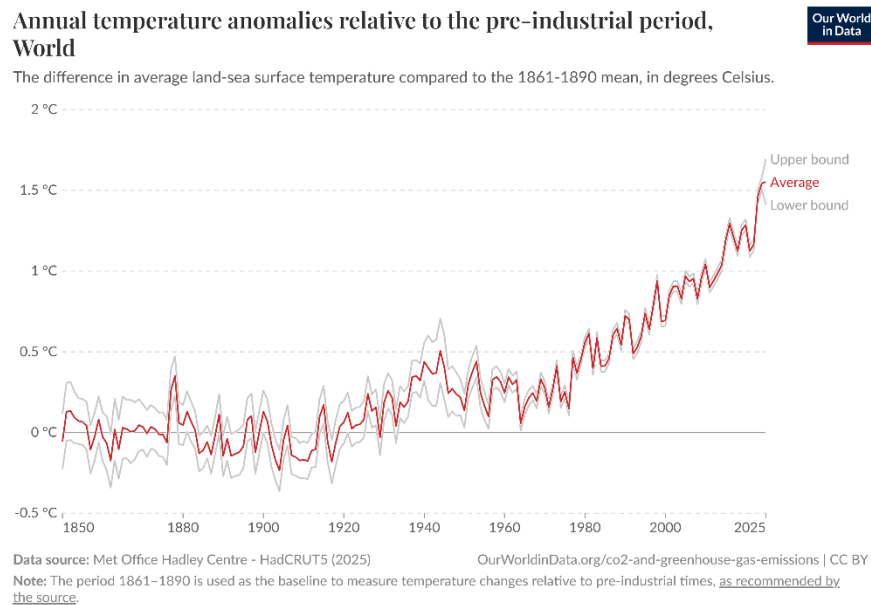
mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan melalui penerapan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang kini menjadi perhatian utama dalam praktik bisnis dan kebijakan investasi global. Di samping itu, perusahaan yang terdaftar dalam indeks ini juga menunjukkan kemampuan dalam mempertahankan kinerja keuangan yang baik. Pengungkapan emisi karbon menjadi aspek yang sangat penting untuk membangun kepercayaan investor di tengah meningkatnya kebutuhan akan transparansi lingkungan (PwC, 2022). Seiring dengan pertumbuhan tren investasi berbasis ESG, perusahaan dituntut untuk lebih aktif dan terbuka dalam menyajikan informasi terkait emisi karbon guna memenuhi harapan investor yang semakin peduli terhadap isu lingkungan (Santoso et al., 2024).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Isu lingkungan tentang perubahan iklim, gas rumah kaca, dan tingginya produksi karbon telah menjadi permasalahan global yang semakin mendesak dalam beberapa tahun terakhir (Darlis et al., 2020). Pada tahun 2023, *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) melaporkan bahwa pemanasan global yang disebabkan oleh manusia telah mencapai 1,1°Celsius. Laporan ini menyoroti bahwa peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia (Boehm dan Schumer, 2023). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan urgensi pembaruan rencana iklim, mengingat waktu yang semakin terbatas. Negara-negara di seluruh dunia perlu segera memperbarui strategi iklim untuk mencegah dampak buruk bagi manusia serta menghindari titik kritis yang akan semakin sulit ditangani (Novena, 2024).

Menurut laporan *National Aeronautics and Space Administration* (NASA), peningkatan suhu global yang terus berlanjut memicu cuaca ekstrem yang semakin sering dan intens, termasuk gelombang panas, badai yang lebih kuat, serta kekeringan yang berkepanjangan. Dampak ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, kualitas air, dan kesehatan manusia, seperti meningkatnya penyebaran penyakit serta gangguan pernapasan akibat polusi udara. Selain itu, laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) juga menegaskan bahwa perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut dan

bencana alam yang semakin parah, akan terus memburuk seiring tingginya emisi gas rumah kaca (NASA, 2021).



Gambar 1.2 Tren Kenaikan Suhu Rata-Rata Global terhadap Periode Pra-Industri (1861–2024)

Sumber: Met Office Hadley Centre, dalam laman Our World in Data (2025)

Gambar 1.2 di atas menunjukkan tren peningkatan suhu rata-rata global dibandingkan dengan suhu rata-rata pada periode pra-industri (1861–1890), yang dijadikan sebagai *baseline* atau titik acuan pengukuran. Berdasarkan data tersebut, suhu rata-rata global telah meningkat secara signifikan sejak awal abad ke-20, dan pada tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah, sekaligus menjadi tahun pertama di mana suhu global melebihi 1,5°C di atas tingkat pra-industri. Kenaikan ini secara langsung berkaitan dengan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang sebagian besar dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas industri lainnya (Our World in Data, 2025). Meskipun target internasional seperti Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) telah menetapkan batas aman kenaikan suhu global, yakni 1,5°C, namun laju akumulasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama CO₂ masih terus meningkat (CarbonBrief, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa upaya global untuk menekan emisi masih belum cukup efektif.

Upaya global dalam menghadapi perubahan iklim diawali dengan pembentukan *United Nations Framework Convention on Climate Change*

(UNFCCC), sebuah konvensi internasional yang melibatkan 198 negara untuk menangani isu iklim (United Nations Climate Change, 2022). Dalam mewujudkan tujuannya, negara-negara pihak UNFCCC pertama kali mengambil langkah melalui Protokol Kyoto, yang diadopsi pada tahun 1997 dan mulai diberlakukan pada 2005. Protokol ini merupakan perjanjian internasional pertama yang menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju. Namun, implementasi perjanjian ini menghadapi kendala karena tidak adanya kewajiban bagi negara berkembang untuk mengurangi emisi, serta adanya negara maju yang menarik diri dari komitmen mereka. Sebagai tindak lanjut, anggota UNFCCC menyepakati Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) dalam COP21 yang diselenggarakan di Paris, Prancis, pada tahun 2015. Berbeda dengan Protokol Kyoto, Persetujuan Paris mewajibkan seluruh negara, baik negara maju maupun berkembang, untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (Benduski, 2020). Salah satu tujuan utama perjanjian ini adalah membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°Celsius, dengan target lebih ambisius untuk menekan hingga 1,5°Celsius guna mengurangi dampak perubahan iklim yang lebih ekstrem (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Sebagai bagian dari anggota UNFCCC, Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mendukung upaya global untuk menangani perubahan iklim dengan meratifikasi Protokol Kyoto 1997. Ratifikasi ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2004, yang disahkan pada 28 Juli 2004. Implementasi dari Protokol Kyoto mewajibkan industri untuk mengukur, mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan emisi karbon, yang kemudian menjadi dasar pengembangan konsep *carbon accounting* (Rosa et al., 2024). Indonesia juga melakukan harmonisasi terhadap isi protokol ini melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Setyaningrum, 2015). Sebagai kelanjutan dari komitmen tersebut, Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) pada tahun 2016 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Indonesia juga menyampaikan komitmen terbarunya dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) yang diperbarui pada tahun 2022. Berikut ringkasan dokumen NDC Indonesia dari tahun 2016, 2021, dan yang terbaru pada 2022:

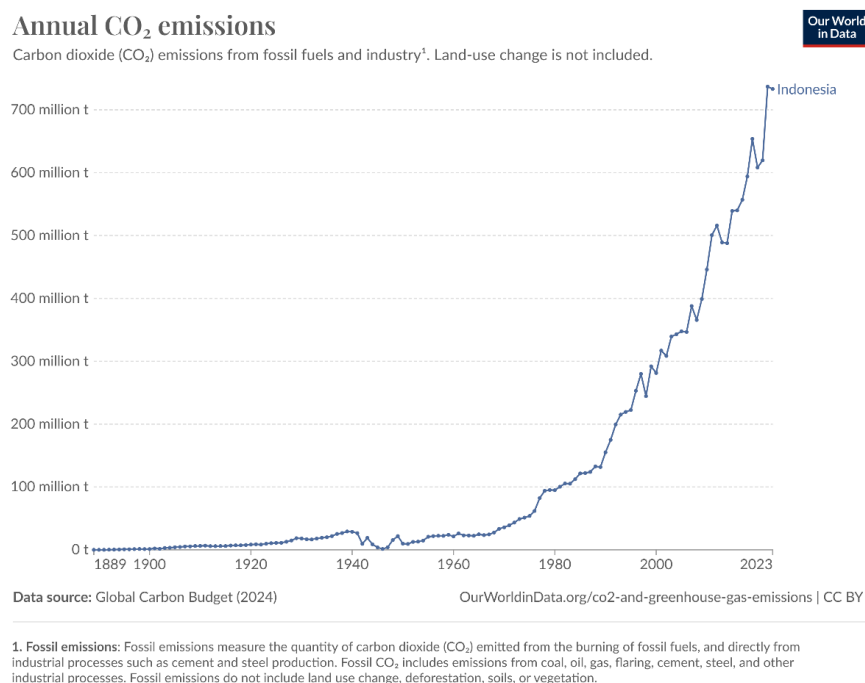
Tabel 1.1 Ringkasan Target Indonesia dalam Dokumen NDC

Tahun	<i>Unconditional Target</i>	<i>Conditional Target</i>
2016 (NDC Pertama)	Berkomitmen secara tanpa syarat untuk mengurangi 29% emisi gas rumah kaca di bawah skenario <i>business as usual</i> (BAU) pada tahun 2030.	Meningkatkan kontribusinya dalam pengurangan emisi hingga mencapai 41% pada tahun 2030 dengan syarat, yaitu adanya ketersediaan dukungan internasional dalam bentuk pembiayaan, alih teknologi, serta pengembangan dan penguatan kapasitas.
2021 (Updated NDC)	Berkomitmen untuk mengurangi 29% emisi gas rumah kaca tanpa syarat di bawah skenario <i>business as usual</i> (BAU) pada tahun 2030.	Meningkatkan kontribusinya dalam pengurangan emisi hingga mencapai 41% pada tahun 2030 dengan syarat, yaitu adanya ketersediaan dukungan internasional dalam bentuk pembiayaan, alih teknologi, serta pengembangan dan penguatan kapasitas.
2022 (Enhanced NDC – ENDC)	Penyempurnaan dokumen NDC telah menaikkan target pengurangan emisi tanpa syarat Indonesia menjadi 31,89%, meningkat dari target sebelumnya sebesar 29% yang tercantum dalam NDC awal.	Meningkatkan kontribusinya hingga 43,20% pengurangan emisi di tahun 2030 dengan syarat, yaitu adanya ketersediaan dukungan internasional dalam bentuk pembiayaan, alih teknologi, serta pengembangan dan penguatan kapasitas.

Sumber: Climate Action Tracker; Tabel disusun Penulis (2023)

Berdasarkan data pada tabel 1.1, Indonesia telah meningkatkan target pengurangan emisinya dari 29% menjadi 31,89% dengan tanpa syarat (*unconditional target*), dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional (*conditional target*), termasuk emisi dari sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan atau biasa disingkat LULUCF (*Land Use, Land-Use Change and Forestry*) (Climate Action Tracker, 2024). Meskipun target pengurangan emisi Indonesia naik, namun menurut laporan Climate Action Tracker, target NDC bersyarat Indonesia tanpa mempertimbangkan sektor LULUCF dikategorikan sebagai “*Critically insufficient*”, yang menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia masih jauh dari memadai untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C. Bahkan, untuk mencapai tingkat emisi yang sejalan dengan skenario 1,5°C, Indonesia perlu menurunkan target emisi bersyaratnya menjadi 62% di bawah skenario BAU. Jika seluruh negara menerapkan serupa, maka pemanasan global diperkirakan akan melebihi 4°C, yang tentu akan memperburuk dampak krisis iklim secara global (Climate Action Tracker, 2024).

Emisi karbon, terutama emisi karbon dioksida (CO₂), dianggap sebagai salah satu faktor perubahan iklim yang paling menonjol dan dinilai sebagai penyebab utama masalah lingkungan saat ini (Treepongkaruna et al., 2024). Untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim, negara-negara di dunia perlu sesegera mungkin mengurangi emisi yang mereka hasilkan. Namun, tanggung jawab ini sering menjadi perdebatan dalam diskusi internasional karena berbagai cara perbandingan emisi, seperti emisi tahunan per negara, emisi per kapita, kontribusi historis, dan apakah emisi tersebut disesuaikan dengan barang dan jasa yang diperdagangkan. Perdebatan ini penting dilakukan karena akan menentukan bagaimana kebijakan iklim global dirancang dan diimplementasikan (Ritchie et al., 2024). Negara-negara maju harus mengakui sekaligus memenuhi tanggung jawab dalam upaya internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, mengingat tekanan yang diberikan masyarakat mereka terhadap permasalahan lingkungan global melalui teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka miliki. Sedangkan negara berkembang juga tidak bisa terlepas dari tanggung jawab ini meskipun kontribusi historis mereka terhadap emisi global lebih kecil dibandingkan negara-negara maju (Legal Response International, 2012).

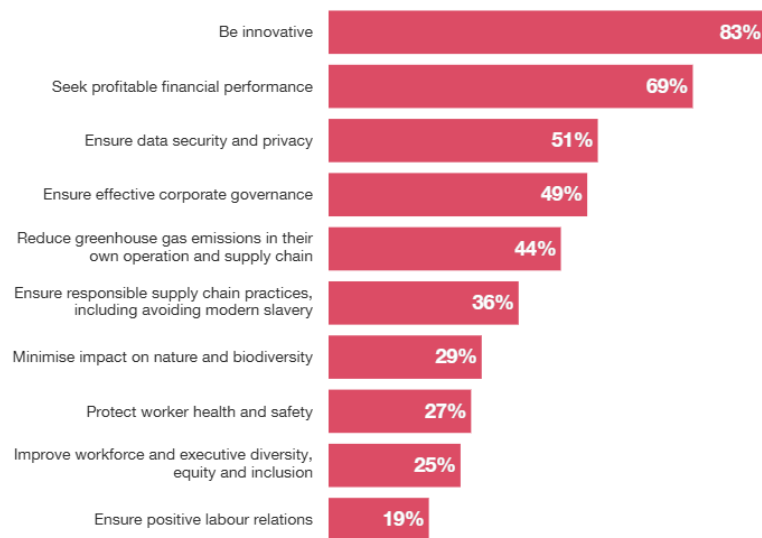


Gambar 1.3 Jumlah Emisi CO₂ tahunan Indonesia

Sumber: Ritchie, Rosado & Max Roser, dalam laman Our World in Data (2023)

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tanggung jawab besar karena jumlah emisi yang dihasilkan. Berdasarkan gambar 1.3, emisi karbon dioksida (CO₂) tahunan Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama sejak tahun 1970-an. Data jumlah emisi ini hanya mencakup jumlah karbon dioksida akibat pembakaran bahan fosil serta proses industri, tidak mencakup emisi dari perubahan penggunaan lahan atau deforestasi. Puncaknya, pada tahun 2023 emisi karbon yang dihasilkan Indonesia mencapai 733,22 juta ton (Ritchie et al., 2024). Pada tahun 2022, Indonesia mengalami peningkatan hasil emisi tertinggi dibandingkan dengan negara lain sebesar 18,3% dari tahun sebelumnya (Databoks, 2023). Meskipun pada tahun 2023 emisi karbon dioksida (CO₂) Indonesia mengalami penurunan sekitar 3 juta ton dari tahun sebelumnya, namun Indonesia tetap menduduki 10 besar penghasil emisi CO₂ di dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa penurunan tersebut tidak cukup signifikan untuk mengubah posisi Indonesia dalam daftar negara dengan emisi tertinggi, mengingat kontribusi besar dari aktivitas sektor industri dan pembakaran bahan fosil yang sekaligus menjadi penyumbang utama emisi (Indonesia Environment Center, 2024).

Untuk mengurangi peningkatan emisi karbon, perusahaan memegang tanggung jawab yang sangat besar, mengingat kontribusi signifikan dari sektor perusahaan terhadap total emisi di Indonesia. Pada tahun 2021, sektor lapangan usaha menyumbang 536,83 juta ton CO₂, atau sekitar 86,7% dari total emisi karbon dioksida di Indonesia, jauh lebih besar dibandingkan sektor rumah tangga (Databoks, 2023). Sebagai bentuk tanggung jawab, salah satu langkah yang perlu diterapkan adalah melalui pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*). Melalui pengungkapan ini, perusahaan dapat menyampaikan jumlah emisi yang dihasilkan serta strategi konkret untuk menguranginya. Selain menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, *carbon emission disclosure* juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan, terutama di tengah tuntutan global untuk mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2050.



Gambar 1.4 Hasil Survei Prioritas Utama Bisnis Menurut Investor

Sumber: PwC's Global Investor Survey (2022)

Gambar 1.3 menunjukkan prioritas utama yang diharapkan oleh para investor dari perusahaan, berdasarkan survei global oleh *PricewaterhouseCoopers* (PwC) pada tahun 2022. Dalam survei ini, pengurangan emisi karbon menduduki peringkat kelima sebagai prioritas utama bagi investor, dengan 44% responden menyebutnya sebagai fokus utama. Hasil survei ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian investor terhadap isu lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, baik dalam operasi perusahaan maupun rantai pasokan, menjadi tolok ukur penting dalam menarik minat investasi. Pengurangan emisi karbon tidak hanya mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan tetapi juga menunjukkan kesadaran akan risiko bisnis yang dapat muncul akibat perubahan iklim (PwC, 2022). Untuk memungkinkan investor menilai pengaruh perubahan iklim terhadap kegiatan operasional perusahaan, akuntan perlu menyajikan informasi terkait isu perubahan iklim dalam laporan keuangan. Informasi yang disampaikan harus mencakup kuantifikasi atas dampak perubahan iklim terhadap operasional perusahaan (Mahardika, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, *carbon emission disclosure* atau pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu upaya yang harus menjadi prioritas perusahaan. Selain berperan dalam mengurangi peningkatan emisi karbon di Indonesia, praktik ini juga dapat meningkatkan kepercayaan

investor serta mendapatkan dukungan masyarakat. Namun, untuk memastikan konsistensi dalam penerapannya, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi implementasi pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor tersebut mencakup kinerja keuangan, yang diukur melalui profitabilitas dan nilai perusahaan.

Faktor pertama, yaitu profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan keuangan perusahaan yang memadai, sehingga perusahaan akan lebih mampu dalam memenuhi tuntutan pengungkapan emisi karbon (Widyastuti et al., 2023). Kondisi keuangan yang baik memungkinkan perusahaan untuk menyusun laporan pengungkapan secara sukarela dengan kualitas yang lebih baik serta lebih maksimal dalam menghadapi tekanan pihak eksternal (Bae Choi et al., 2013). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Aria Sandi et al. (2021) dan Widyastuti et al. (2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Gunawan & Aryati (2024), Ratmono et al. (2020), dan Sekarini & Setiadi (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *carbon emission disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas belum menjamin perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon. Sedangkan penelitian Muslih & Caesaria (2024) dan (Dharma et al., 2024) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Faktor kedua, yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan digunakan sebagai indikator atau cerminan persepsi publik terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Nathalie, 2024). Nilai perusahaan mencerminkan persepsi atau penilaian investor terhadap kemampuan suatu entitas bisnis yang memiliki tingkat investasi tinggi di pasar, dan nilai tersebut dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dalam pengambilan keputusan investasi (Ayu Laksani et al., 2020). Hasil penelitian Al- Mari & Mardini (2024) menunjukkan bahwa nilai perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan akan menerapkan praktik pengungkapan emisi karbon yang lebih baik seiring dengan kinerja keuangan yang semakin tinggi dalam indikator pasar. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Ayu Laksani et al., 2020) dan (Dharma et al., 2024), yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon sekaligus menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini adalah *firm size*, *liquidity* dan *leverage*. *Firm size* atau ukuran perusahaan merupakan suatu skala, ukuran atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan (Muchlisin Riadi, 2020). Perusahaan yang lebih besar akan semakin menghadapi tekanan yang lebih tinggi dari masyarakat dan pemangku kepentingan (Nasih et al., 2019 & Rini et al., 2021). Berdasarkan teori legitimasi, aktivitas perusahaan besar lebih terekspos kepada publik dan akses informasi terkait perusahaan tersebut juga lebih mudah diperoleh, sehingga perusahaan besar perlu memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu-isu lingkungan yang berkembang (Mulya & Rohman, 2020). Hasil penelitian Nasih et al. (2019), Rusdi & Helmayunita (2023), dan Wahyuningrum et al. (2022) menunjukkan bahwa *firm size* memiliki pengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Penelitian yang dilakukan Rizky Amalia Rosa et al. (2024) menunjukkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Cahyaningsih & Rahmadiyah (2024) menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh negatif terhadap *carbon emission disclosure*.

Liquidity atau likuiditas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya (Kristanti & Khairunnisa, 2023). Rasio likuiditas berfungsi untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan (Fitriana, 2024). Semakin tinggi nilai likuiditas, maka semakin baik efektivitas perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan teori *stakeholder*, para investor akan semakin tertarik jika perusahaan memiliki likuiditas yang lebih tinggi, karena hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut juga akan lebih cenderung dalam mengatasi permasalahan lingkungan, salah satunya melalui pengurangan emisi karbon (Gunawan & Aryati, 2024). Penelitian dari Wardhani & Kawedar (2019) dan (Widyastuti et al., 2023) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Sedangkan penelitian Gunawan & Aryati

(2024) menemukan bahwa tingkat likuiditas tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Faktor terakhir, yaitu *leverage*. Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang (Rusdi & Helmayunita, 2023). Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sangat tergantung terhadap utang dalam memenuhi biaya asetnya (Aprilyani Dewi & Agustina, 2023). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan lebih berhati-hati dalam melanjutkan keputusan-keputusan, terutama ketika melakukan investasi dalam langkah-langkah untuk mengurangi emisi karbon (Puteri & Inawati, 2023). Berbeda dengan pendapat Akhter et al. (2023) yang menyatakan jika perusahaan yang berukuran besar dan memiliki rasio *leverage* yang tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi lingkungan karena dihadapkan pada tekanan pemangku kepentingan dan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Zanra et al. (2020), Aprilyani Dewi & Agustina (2023), dan (Santoso et al., 2024) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *carbon emission disclosure*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Rusdi & Helmayunita (2023) dan Tianisyah Mi'raz & Dwi Astuti (2024) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, isu perubahan iklim merupakan isu yang telah mendapat perhatian baik di tingkat nasional maupun global, hal ini dipicu oleh peningkatan emisi karbon. Meskipun pengungkapan informasi lingkungan oleh perusahaan telah menjadi kewajiban, namun masih terdapat banyak perusahaan yang menunjukkan tingkat pengungkapan yang rendah. Selain itu, hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya inkonsistensi temuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Terhadap *Carbon Emission Disclosure* dengan Variabel Kontrol *Firm Size*, *Liquidity*, dan *Leverage* (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks ESGQKEHATI Periode 2021-2024).

1.3 Perumusan Masalah

Pengungkapan emisi karbon menjadi perhatian penting dalam praktik bisnis modern, seiring dengan meningkatnya urgensi perubahan iklim dan tuntutan transparansi dari berbagai pemangku kepentingan, terutama investor. Meskipun pengungkapan informasi lingkungan telah diwajibkan, pada praktiknya masih banyak perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan yang rendah. Tingkat pengungkapan yang rendah tentu akan dinilai sebagai sebuah masalah, terlebih karena pengungkapan ini berperan penting dalam membangun kepercayaan publik dan investor, serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim secara global. Sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan dan tuntutan transparansi informasi lingkungan, berbagai indeks saham berbasis ESG mulai dikembangkan dan diterbitkan oleh sejumlah lembaga yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, salah satunya yaitu indeks ESGQKEHATI.

Indeks ESGQKEHATI menjadi salah satu indikator penting yang menilai kinerja perusahaan dalam aspek keberlanjutan. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks ini tidak hanya dinilai berdasarkan aspek ESG, tetapi juga berdasarkan kinerja keuangan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan dari berbagai pihak untuk mengurangi dampak lingkungan, perusahaan yang tercatat dalam indeks ESGQKEHATI diharapkan mampu menunjukkan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon adalah kinerja keuangan, yang sekaligus menjadi penilaian di indeks ini. Namun penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan masih adanya inkonsistensi hasil penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas, nilai perusahaan, *firm size*, *liquidity*, *leverage*, dan *carbon emission disclosure* pada perusahaan yang terdaftar di indeks ESGQKEHATI periode 2021-2024?
2. Apakah profitabilitas dan nilai Perusahaan berpengaruh secara simultan signifikan terhadap *carbon emission disclosure* dengan variabel kontrol

firm size, *liquidity*, dan *leverage* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks ESGQKEHATI periode 2021-2024?

3. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial signifikan terhadap *carbon emission disclosure* dengan variabel kontrol *firm size*, *liquidity*, dan *leverage* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks ESGQKEHATI periode 2021-2024?
4. Apakah nilai perusahaan berpengaruh secara parsial signifikan terhadap *carbon emission disclosure* dengan variabel kontrol *firm size*, *liquidity*, dan *leverage* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks ESGQKEHATI periode 2021-2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka dapat dihasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana profitabilitas, nilai Perusahaan, *firm size*, *liquidity*, *leverage*, dan *carbon emission disclosure* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks ESGQKEHATI periode 2021-2024.
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas dan nilai perusahaan berpengaruh secara simultan signifikan terhadap *carbon emission disclosure* dengan variabel kontrol *firm size*, *liquidity*, dan *leverage* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks ESGQKEHATI periode 2021-2024.
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial signifikan terhadap *carbon emission disclosure* dengan variabel kontrol *firm size*, *liquidity*, dan *leverage* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks ESGQKEHATI periode 2021-2024.
4. Untuk mengetahui apakah nilai perusahaan berpengaruh secara parsial signifikan terhadap *carbon emission disclosure* dengan variabel kontrol *firm size*, *liquidity*, dan *leverage* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks ESGQKEHATI periode 2021-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi positif, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mencakup dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman baru mengenai ilmu dan literatur terkait pengungkapan emisi karbon pada perusahaan yang terdaftar di indeks ESGQKEHATI khususnya selama periode 2021-2024, sekaligus dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji pengungkapan emisi karbon pada perusahaan yang terdaftar di indeks ESGQKEHATI. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya penelitian yang lebih mendalam dan relevan, dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan lingkungan dan tren global terkait topik keberlanjutan.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah informasi bagi perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengungkapan emisi karbon, sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada dalam laporan keberlanjutan mereka.

2. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi calon investor dalam pengambilan keputusan investasi, dengan tidak hanya mempertimbangkan kinerja keuangan, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang dihasilkan perusahaan.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan keberlanjutan dan pengungkapan emisi karbon.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan ini menjadi gambaran singkat mengenai struktur isi penelitian yang terdiri dari lima bab. Berikut penjelasan dari masing-masing bab tersebut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi penjelasan terkait gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan yang konsisten terdaftar di indeks ESGQKEHATI periode 2021-2024, kemudian latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari sisi aspek teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan tinjauan pustaka dari teori yang digunakan dari umum hingga khusus mengenai *carbon emission disclosure*, profitabilitas, nilai perusahaan, *firm size*, *liquidity*, dan *leverage*. Selain itu, di bab ini juga menyajikan penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar acuan bagi penelitian ini, kemudian dilanjutkan pengembangan hipotesis melalui kerangka pemikiran, yang menghasilkan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan jenis penelitian yang akan digunakan serta operasionalisasi variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan *carbon emission disclosure* sebagai variabel dependen, profitabilitas dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen, serta *firm size*, *liquidity*, dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Selain itu, di bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan, populasi yang menjadi sasaran, sampel yang akan dianalisis, serta teknik analisis data yang diterapkan untuk mengumpulkan dan mengolah hasil penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menguraikan hasil penelitian secara sistematis, yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama menyajikan hasil analisis data yang telah diinterpretasikan, diikuti dengan pembahasan dari hasil analisis tersebut. Bagian kedua membahas hasil analisis yang telah diinterpretasikan, kemudian dibandingkan dengan penelitian terdahulu atau landasan teoritis yang relevan, untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam terhadap temuan penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat memberikan solusi terkait masalah yang ditemukan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga mengemukakan rekomendasi serta usulan untuk penelitian selanjutnya guna memperdalam pemahaman tentang topik yang diteliti.